

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA  
PLUS TERINTEGRASI OLEH PEMERINTAH DESA PENGALIHAN  
KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2023**

**Oleh : Anisa Nur Safitri**

**Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*This study discusses the implementation of the Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Program by the Village Government of Pengalihan, Keritang District, Indragiri Hilir Regency in 2023. Despite ongoing issues related to both physical and non-physical development in Pengalihan Village, a significant portion of the DMIJ Plus Terintegrated Program's budget in 2023 was allocated to village governance activities. As a result, community involvement in the program's activities remained limited. The aim of this research is to examine the implementation of the DMIJ Plus Terintegrated Program by the Village Government of Pengalihan in 2023 and to identify the influencing factors.*

*This study employs a qualitative approach with descriptive analysis. The data used consist of primary data collected through interviews with informants, and secondary data obtained from relevant documents. Data collection techniques include interviews and documentation. The research applies David C. Korten's program implementation theory, which emphasizes three main elements: program appropriateness, implementing organization, and target group (beneficiaries).*

*The findings reveal that the program was primarily focused on the operational aspects of village governance, while physical development and community empowerment remained limited due to budget constraints. Organizationally, the structure was in place, but the quality of human resources was still low. From the target group perspective, community participation was lacking due to limited understanding and direct involvement. Overall, the program implementation has not been optimal and has yet to fully address the community's needs. A more participatory approach, enhanced capacity of village apparatus, and strengthened budget management are necessary to ensure more effective and sustainable program implementation.*

***Keywords:*** *DMIJ Plus Terintegrated, Program, Village Government*

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, dimana hal tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah yakni untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan desa telah diluncurkan, salah satunya oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya atau yang sejak tahun 2019 disebut DMIJ Plus Terintegrasi, yang merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berbagai upaya pembangunan di tingkat desa telah dilakukan sejak lama, salah satunya melalui pemberian dana ke desa. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana yang diterima kabupaten dalam APBD telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa juga diberi wewenang dalam memanfaatkan dana tersebut untuk kemajuan dan kemakmuran wilayahnya. Desa kini tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi telah menjadi subjek pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merancang Program DMIJ sebagai bentuk percepatan pembangunan desa dan kelurahan serta memperkuat peran pemerintah desa dalam pembangunan wilayahnya.

Program DMIJ telah ada sejak tahun 2014 pada masa pemerintahan Bupati Muhammad Wardan dan Wakil Bupati Rosman Malomo, dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan. Tujuan program ini ialah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa melalui kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2014–2018, masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh

karena itu, Bupati Muhammad Wardan dan Wakil Bupati Syamsudin Uti menyempurnakannya menjadi Program DMIJ Plus Terintegrasi, yang dimulai pada tahun 2019 sebagai kelanjutan dari program sebelumnya ([transmediariau.com](http://transmediariau.com)). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sesuai dengan tujuan Program DMIJ sebagaimana tercantum dalam Perbup Inhil Nomor 52 Tahun 2022. Fokus program ini mencakup peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui dana ADD, dengan dukungan kebijakan daerah. Cakupan program meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perdesaan (Syariffuddin & Jamri, 2021).

Program DMIJ Plus Terintegrasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi. Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah Program pembangunan dan/atau pemberdayaan desa dan kelurahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan mengintegrasikan berbagai Program pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang dilakukan di tingkat desa dan/atau kelurahan, kelembagaan dan masyarakat desa, serta lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Sasaran dan jenis kegiatan Program DMIJ plus lebih berupaya mempertegas peran masyarakat untuk dapat menentukan sendiri pembangunan yang akan dilakukan di desanya. Program ini fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur desa, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendanaan dari Alokasi Dana Desa (ADD)

yang didukung oleh kebijakan daerah. Fokus program ini mencakup pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perdesaan (Syariffuddin And Jamri 2021).

Dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 disebutkan bahwa skala prioritas penggunaan dana DMIJ Plus Terintegrasi terdiri dari lima kelompok, yaitu: (1) penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) penyelenggaraan pembangunan desa; (3) pembinaan kemasyarakatan desa; (4) pemberdayaan masyarakat desa; dan (5) penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Desa Pengalihan merupakan salah satu desa di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir yang telah melaksanakan Program DMIJ Plus Terintegrasi sejak awal terbentuknya program ini. Pada dasarnya, program ini ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya, upaya fasilitasi pembangunan desa di Desa Pengalihan masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022, terdapat lima poin skala prioritas penggunaan dana, namun di Desa Pengalihan lebih banyak direalisasikan pada poin pertama, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari realisasi APBDes Desa Pengalihan Tahun 2023, dimana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa menghabiskan anggaran sebesar 81,65%, sedangkan pelaksanaan pembangunan desa hanya sebesar 0,13%, pembinaan kemasyarakatan 16,82%, dan pemberdayaan masyarakat sebesar 1,37% (Olahan Penulis). Dana yang digunakan berasal dari Program DMIJ, yaitu bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp24.433.510 dan alokasi dana desa sebesar Rp874.508.600, dengan total anggaran Program DMIJ mencapai Rp898.942.110, yang merupakan pendapatan terbesar kedua setelah dana desa

Di Desa Pengalihan menunjukkan masih banyak permasalahan dalam berbagai aspek pembangunan. Di bidang infrastruktur, masih terdapat jalan dan jembatan yang belum memadai, sebagian besar masih berupa jalan tanah dan sirtu yang menghambat distribusi barang dan jasa. Selain itu, saluran drainase yang belum layak juga sering menyebabkan banjir. Pembangunan yang tidak merata menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Dalam bidang partisipasi, Program DMIJ Plus Terintegrasi menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Namun, di Desa Pengalihan, keikutsertaan masyarakat dalam rapat desa, pelaksanaan kegiatan, maupun evaluasi pembangunan masih tergolong rendah (Hidayat, 2022). Di sisi lain, anggaran DMIJ Plus Terintegrasi di desa ini pada umumnya lebih dulu dialokasikan untuk urusan pemerintahan desa seperti siltap kepala desa dan perangkat, tunjangan BPD, dan pemeliharaan aset desa. Jika terdapat sisa anggaran, barulah digunakan untuk pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan.

Pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa sebagai motor penggerak yang memahami kondisi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan kegiatan program agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemampuan memahami konteks lokal memungkinkan pelaksanaan program yang lebih relevan dan efektif. Dengan dukungan Pemerintah Kabupaten dan kerja sama antara Pemerintah Desa dan masyarakat, Desa Pengalihan diharapkan menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Pelaksanaan Program

Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

### B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Oleh Pemerintah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023?
2. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Oleh Pemerintah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Oleh Pemerintah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Oleh Pemerintah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

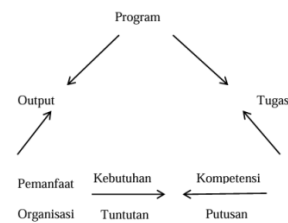
### D. TINJAUAN TEORI Implementasi Program

Implementasi menurut van meter dan van horn (dalam Nurwanda Asep 2017) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Salah satu model implementasi Program adalah yang dikemukakan oleh David C. Korten (1988). Model ini menggunakan pendekatan proses pembelajaran dan dikenal sebagai model

kesesuaian implementasi Program yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Model Kesesuaian Program



Sumber : Sumber Akib, H., & Tarigan, A. (2008).

Tiga elemen implementasi yang di sebutkan oleh David C Korten yaitu (Akib, H., & Tarigan, A. 2008):

1. Elemen Program, menurut korten harus ada kesesuaian antara Program, dengan apa yang dibutuhkan kelompok sasaran, Kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh Program dengan kebutuhan kelompok sasaran. Namun, jika hasil atau output Program tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, implementasinya akan berdampak pada gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan tidak memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.

Adapun indikator suatu program dapat dikatakan baik jika terdapat beberapa aspek diantaranya (I.Gk and Noviatno n.d.):

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas
  - b. Adanya kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan
  - c. Adanya anggaran program
  - d. Adanya strategi dalam pelaksanaan program
2. Organisasi pelaksana, menurut korten Program harus selaras dengan organisasi pelaksana, yaitu memastikan bahwa tugas yang dibutuhkan oleh Program sesuai dengan kapasitas organisasi tersebut. Karena itu, kemampuan implementator sebagai sumber daya manusia berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Apabila implementator memiliki disposisi yang positif, mereka akan menjalankan kebijakan dengan baik dan sebaliknya.

3. Kelompok sasaran, menurut korten diperlukan keselarasan antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana agar hasil Program dapat sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran tersebut, maka dapat dikatakan Program tersebut sukses karena dapat diterima oleh kelompok sasaran.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian menggunakan metode deskriptif yang dimana dapat diartikan sebagai suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif, data yang diperoleh dilapangan dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Penelitian ini belokasi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan peneliti memilih Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai lokasi penelitian karena program DMIJ Plus Terintegrasi telah berjalan sejak tahun 2019 dan menjadi sumber pendapatan terbesar kedua bagi desa. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, berdasarkan APBDesa tahun 2023, alokasi dana DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan lebih difokuskan pada operasional pemerintahan desa, sementara kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat belum optimal. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara bersama informan. Informan dalam penelitian ini antara lain Kepala desa, Sekretaris desa, BPD, dan Masyarakat desa. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **F. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir jaya Plus Terintegrasi oleh Pemerintah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Tahun 2023**

Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya(DMIJ) Plus Terintegrasi oleh Pemerintah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dimulai dengan tahap perencanaan berikut tahapan perencanaan program DMIJ Plus Terintegrasi :

- a. Sosialisasi Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan (Musyawarah desa); Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya(DMIJ) Plus Terintegrasi yang diselenggarakan pada musyawarah desa atau musyawarah desa sosialisasi (MD Sosialisasi), sosialisasi ini dapat berisi mengenai tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur serta pendanaan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi.
- b. Penyusunan RPJM Desa; dilakukan penyusunan RPJM Desa sebagai acuan dan pedoman serta ukuran pemerintahan desa dalam bekerja dan mengambil keputusan, hasil yang diharapkan ialah keputusan yang diambil dalam kegiatan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan serta gagasan masyarakat.
- c. Penyusunan dan Pembahasan Draf RPPJM Desa; RPJM di susun sesuai dengan visi misi desa, dan melihat apakah sudah menampung seluruh permasalahan pembangunan yang termasuk dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, apakah usulan waktu pelaksanaan sudah sesuai dengan prioritas desa, apakah sudah mendukung visi misi Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Musyawarah Penetapan RPJM Desa; Setelah dokumen RPJM Desa sepenuhnya lengkap dan memuat seluruh aspek perencanaan pembangunan, selanjutnya maka dilakukan penetapan RPJM Desa yang dihadiri oleh

Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan masyarakat lainnya.

- e. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes); Proses penyusunan RKP Desa melibatkan musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjabarkan RPJM Desa. Selanjutnya RKP Desa disusun sesuai dengan skala prioritas desa dengan referensi skala prioritas daerah yang memuat tentang program DMIJ Plus Terintegrasi.
- f. Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RABDesa); Selanjutnya Setelah RKP Desa di tetapkan maka dapat dilakukan penyusunan Rencana anggaran biaya desa atau disebut dengan RAB desa disusun bersama tim penyusun RKP desa bersama pemerintah desa dan BPD dan dikonsultasikan kepada camat, Hasil rekomendasi Camat selanjutnya dilakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme dan disahkan menjadi APB Desa.

Adapun tahapan pelaksanaan Program yakni meliputi :

- a. Pelaksanaan  
Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RKPDesa yang telah disepakati, pelaksanaan kegiatan perlu dilaporkan pula kepada masyarakat yang difasilitasi BPD serta masyarakat menjadi prioritas untuk ikut bekerja dalam kegiatan baik fisik maupun nonfisik. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang didanai oleh program DMIJ Plus Terintegrasi ialah; kelompok penyelenggaran pemerintah desa yakni kegiatan Gebyar DMIJ tahun 2023, kelompok pelaksanaan pembangunan desa yakni penyelenggaraan informasi publik, kelompok pembinaan kemasyarakatan yakni Festival Rebana dan pembinaan pemuda dan olahraga.
- b. Dokumentasi kegiatan, sebagai bukti bahwa terselenggarakannya kegiatan dalam pelaksanaan program DMIJ Plus

Terintegrasi dan kegiatan pembangunan lainnya.

- c. Musyawarah desa Laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes)  
LKPI Kepala Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, termasuk pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDes, yang disampaikan kepada masyarakat melalui BPD. Musrenbang Desa, yang biasanya dilaksanakan pada bulan Januari di Desa Pengalihan, merupakan forum partisipatif untuk menyusun RKP Desa berdasarkan hasil review RPJM Desa. Dalam forum ini ditetapkan usulan kegiatan yang sesuai dengan kriteria pendanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi. Musrenbang juga menjadi wujud transparansi desa yang dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023**

### **1. Elemen Program**

Kesesuaian antara program dan kelompok sasaran merupakan faktor penting menurut Korten, karena hal ini menentukan tingkat kebermanfaatan program. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program tidak akan memberi dampak yang memberdayakan (Palit, Tulus, & Palar, 2022).

Untuk melihat suatu program dapat dikatakan baik dapat memuat beberapa aspek diantaranya :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas.

Tujuan Progam DMIJ Plus Terintegrasi diatur dalam Peraturan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 52 Tahun 2022 Tentang

Mekanisme Program DMIJ Plus Terintegrasi yang juga menjadi dasar hukum Program ini, yang dimana terdapat tujuan umum dan tujuan khusus Program DMIJ Plus Terintegrasi yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tujuan umum Program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan dapat dikatakan telah tercapai, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik melalui penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pengadaan sarana prasarana kantor dan layanan administrasi kependudukan (APBDes Pengalihan 2023). Namun, beberapa tujuan khusus belum tercapai secara optimal, seperti pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam lokal, peningkatan sarana pendukung ekonomi melalui sektor pertanian dan perkebunan, serta pelibatan aktif masyarakat miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelestarian hasil pembangunan.

## 2. Adanya Kebijakan Yang Diambil Dalam Mencapai Tujuan

Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki acuan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan daerah maupun pedoman teknis yang menjadi rujukan pelaksanaannya ditingkat desa. Adapun kebijakan untuk mendukung Program ini ada ialah berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi.

## 3. Adanya Anggaran Program (*Budget*)

Program DMIJ Plus Terintegrasi merupakan program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang didanai melalui APBD Kabupaten, meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan kepada desa (Perbup Inhil No. 52 Tahun 2022 Bab VIII).

Selain itu, pendanaan juga dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBDesa, maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Perda Inhil No. 7 Tahun 2021 Pasal 25 ayat 1).

Gambar 1.2 Realisasi anggaran dan kegiatan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

No	Kelompok	Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Rp475.566.100	10 Kegiatan
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Rp1.500.000	1 Kegiatan
3.	Pembinaan kemasyarakatan	Rp181.006.000	9 Kegiatan
4.	Pemberdayaan masyarakat	Rp14.800.000	1 Kegiatan
5.	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	-	-
		Rp672.872.100	21 Kegiatan

Sumber : Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang tahun 2024 (Olahan Penulis)

Sumber dana Program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang melalui Dana Bagi hasil pajak dan retribusi daerah dengan jumlah Rp 24.433.510., dan melalui Alokasi dana desa dengan jumlah Rp 874.508.600., yang digunakan Pemerintah Desa Pengalihan dalam merealisasikan 5 kelompok dengan 21 kegiatan di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang, dengan total realisasi anggaran yakni Rp672.872.100., dengan anggaran yang dialokasi dari kabupaten berjumlah Rp898.942.110,. Namun, hambatan pelaksanaan pembangunan melalui program DMIJ Plus Terintegrasi salah satunya adalah keterbatasan anggaran, sehingga beberapa pembangunan fisik belum dapat dilaksanakan/terbengkalai. Meskipun jika dilihat dari anggaran yang ada dengan realisasi kegiatan pada tahun 2023 terdapat SILPA namun, dana tersebut tidak mencukupi untuk dilakukan pembangunan infrastruktur.

## 3. Adanya Strategi Yang Digunakan

Mengenai strategi dalam Program DMIJ Plus Terintegrasi dalam Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 52

Tahun 2022 Tentang Mekanisme Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Bab X Pengendalian. Selanjutnya Pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 dilakukan dengan menerapkan beberapa strategi agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah desa adalah menyusun rencana kegiatan melalui musyawarah desa bersama masyarakat, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang. Langkah ini dilakukan dengan harapan agar kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang ada di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang.

## 2. Elemen Organisasi Pelaksana

Menurut David C. Korten, harus ada kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yaitu kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Jika kapasitas organisasi tidak memadai, program tidak dapat dijalankan secara efektif, sehingga manfaat bagi masyarakat dan tujuan program sulit tercapai (Abdurrahman & Suriyani, 2022). adapun pelaku-pelaku di desa meliputi:

- a. Kepala desa
- b. Pelaksana pengelolaan keuangan desa
- c. Kepala dusun
- d. Badan permusyawaratan desa
- e. Lembaga pemberdayaan masyarakat
- f. Tim penyusun RPJM dan RKP Desa
- g. Kelompok masyarakat
- h. Pendamping desa

Gambar 1.3 Struktur Pelaksana Program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang



Sumber : Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang (Olahan Peneliti tahun 2025)

Pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan, yang menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menjalankan program sesuai aturan dan mekanisme. Hal ini sejalan dengan teori implementasi David C. Korten, yang menekankan pentingnya kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana. Keterlibatan aktif para pelaku desa tercermin dari peran Kepala Desa dan perangkat dalam pengelolaan keuangan, pengawasan BPD, serta kontribusi masyarakat dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, unsur organisasi pelaksana dalam teori Korten dapat dikatakan telah terpenuhi di Desa Pengalihan.

## 3. Elemen Kelompok Sasaran

Menurut Korten harus ada kesesuaian antara sasaran program dengan capaian yang sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat untuk sasaran program, jika tujuan yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan hasil program yang artinya diperlukan keselarasan antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana agar hasil Program dapat sesuai



dengan kebutuhan kelompok sasaran tersebut, maka dapat dikatakan Program tersebut sukses karena dapat diterima oleh kelompok sasaran (Akib 2010).

Dalam Program DMIJ Plus Terintegrasi kelompok sasaran program secara umum ialah; masyarakat desa pengalihan keritang, kelembagaan masyarakat desa pengalihan kecamatan keritang, pemerintah desa pengalihan kecamatan keritang.

Pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, dalam penelitian ini difokuskan pada kelompok sasaran utama yaitu masyarakat Desa Pengalihan itu sendiri. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Desa Pengalihan sebanyak 7.647 jiwa, yang terdiri dari 3.861 laki-laki dan 3.786 perempuan. Jumlah ini menunjukkan bahwa desa memiliki potensi sosial yang besar. Data ini juga menjadi dasar penting untuk menyusun kegiatan agar lebih tepat sasaran dan merata bagi seluruh masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan program. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi mencerminkan sejauh mana program ini benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang. Sebagaimana Korten menekankan pentingnya keterlibatan kelompok sasaran secara aktif, agar hasil program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan/ pemahaman masyarakat dan keterlibatan masyarakat terhadap Program DMIJ Plus Terintegrasi masih terbatas, yang menunjukkan komunikasi dan sosialisasi program belum maksimal yang diakibatkan oleh kurangnya kepercayaan diri masyarakat untuk berpartisipasi dan menyerahkan

sepenuhnya kepada pemerintah desa dan adanya anggaran bahwa usulan tidak akan segera terwujud ketidaktahuan mengenai hal yang ingin diusulkan, serta alasan kesibukan atau pekerjaan yang menjadi prioritas masyarakat.

## **G. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Pengalihan tahun 2023 fokus pada kegiatan operasional pemerintahan desa, seperti pembayaran gaji perangkat desa, tunjangan BPD, dan operasional kantor. Sementara itu, pembangunan fisik (jalan, jembatan, dan drainase) yang merupakan kebutuhan utama masyarakat, belum menjadi prioritas penggunaan anggaran program DMIJ Plus Terintegrasi. Demikian pula dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang belum dijalankan secara maksimal.

Berdasarkan Teori David C. Korten dalam penelitian disimpulkan bahwa ; Dari sisi program, perencanaan dan regulasi sudah baik, namun terbatasnya anggaran menghambat realisasi kegiatan prioritas, terutama pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dari sisi organisasi pelaksana, struktur telah tersedia, tetapi kualitas SDM masih rendah. Rendahnya pendidikan, keterampilan terbatas, serta sosialisasi yang kurang efektif membuat pelaksanaan program belum optimal. Sementara dari sisi kelompok sasaran, partisipasi masyarakat masih minim karena kurangnya pemahaman dan keterlibatan langsung dalam program. Diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif agar masyarakat merasa dilibatkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan program

### **2. Saran**

1. Pemerintah Desa Pengalihan Diharapkan pengelolaan anggaran Program DMIJ Plus Terintegrasi lebih proporsional, tidak hanya

terfokus pada operasional pemerintahan, tetapi juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Aparatur desa perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas teknis, serta memperkuat pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program agar tercipta pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

2. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Pemerintah Kabupaten diharapkan menambah alokasi dana desa dan memastikan penyalurannya tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Pembinaan serta evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program perlu ditingkatkan, disertai dengan penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa guna menunjang keberhasilan program

3. Masyarakat Desa Pengalihan Masyarakat perlu lebih aktif dalam musyawarah, gotong royong, dan pengawasan program. Peningkatan pemahaman terhadap program desa sangat penting agar masyarakat dapat berperan sebagai mitra pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adlin. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Alaf Riau
- Feny Rita Fiantika et all. 2022. Rake Sarasin *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>.
- Hayat. 2018. "Buku Kebijakan Publik." *Intrans Publishing* (September): 1–121. [https://www.researchgate.net/publication/335788910\\_Buku\\_Kebijakan\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik).
- Hj.rulinawaty kasmad, S.Sos. M.Si. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.
- I.Gk, MANILA, and C. Louis Noviatno. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dakam Negeri*.
- K juman Kundang. 2016. "Modul:12 CPL230-Pengembangan Perangkat Lunak." In *Correspondencias & Analisis*, , 1–23.
- Maulidah, Sri, and Rahyunir Rauf. 2015. *Pemerintahan Desa*.

Pelatihan pengawasan BPKP, Pusat Pendidikan. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*. <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id>.

Raharjo, Muahammad Mu'iz. 2021. *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa Teori, Regulasi Dan Implementasi*. Depok: Rajawali Persabd.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif Dan R&D*. Alfabeta.

Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

### Jurnal

Aandriannto. 2023. "Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya Bidang Sarana Infrastruktur Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2019." *Jom Fisip2* 10: 1–14.

Abdurrahman, and Eddy Suriyani. 2022. "Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belimbing RayaKecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong." *Japb* 5(1): 1–14.

Akib, H., & Taringan, A. "Artikulasi Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya." *Jurnal Kebijakan Publik*: 65–85.

Akib, Haedar. 2010. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1): 1–11.

Akib, Haedar, and Antonius Tarigan. 2008. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya." *Jurnal* 1(8): 1–19.

amalia ayu. 2017. "Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur Di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015." 19(5): 1–23.

April, Muhammad, and Muammar Alkadafi. 2020. "Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Program Desa Maju Inhil Jaya Di Desa Danau Pulau Indah Dan Desa Karya Tani Kecamatan Kempas (Kabupaten Indragiri Hilir)." *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan*

- Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 6(2): 45.
- Hidayat, Ahmad. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir."
- Lahesti Elda, Ema Sapitri. 2022. "Evaluasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur Di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir." 4(2): 23. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>.
- Nurwanda, H. Asep. 2017. "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi Dan Lahan Desa Di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3(2): 37–59.
- PALIT, DEYBI DEBORA, FEMMY M.G TULUSAN, and NOVIE PALAR. 2022. "MPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN DANA DAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA KAASAR KECAMATAN KAUDITAN." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. VIII(133): 12–20.
- Syariffuddin Jamri. 2021. "PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA ( DMIJ ) PLUS TERINTEGRASI GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR." : 29–36.

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi

- Dana Desa, Dana Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Perogram Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi